

Rekam Jejak #PahlawanGambut Sumatera Selatan

Ringkasan Upaya Peningkatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan melalui Peat-IMPACTS Indonesia

Latar Belakang

Indonesia, rumah bagi hamparan lahan gambut tropis terluas di dunia, menyimpan potensi luar biasa sekaligus tantangan besar. Lahan gambut, dengan kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah masif, berperan vital dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan, termasuk konversi lahan dan kebakaran berulang, telah mengubah lahan gambut menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Kebakaran lahan gambut, yang kerap terjadi di musim kemarau, tak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem, tetapi juga membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian. Kabut asap tebal yang dihasilkan mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu transportasi, dan menimbulkan masalah pernapasan bagi jutaan orang.

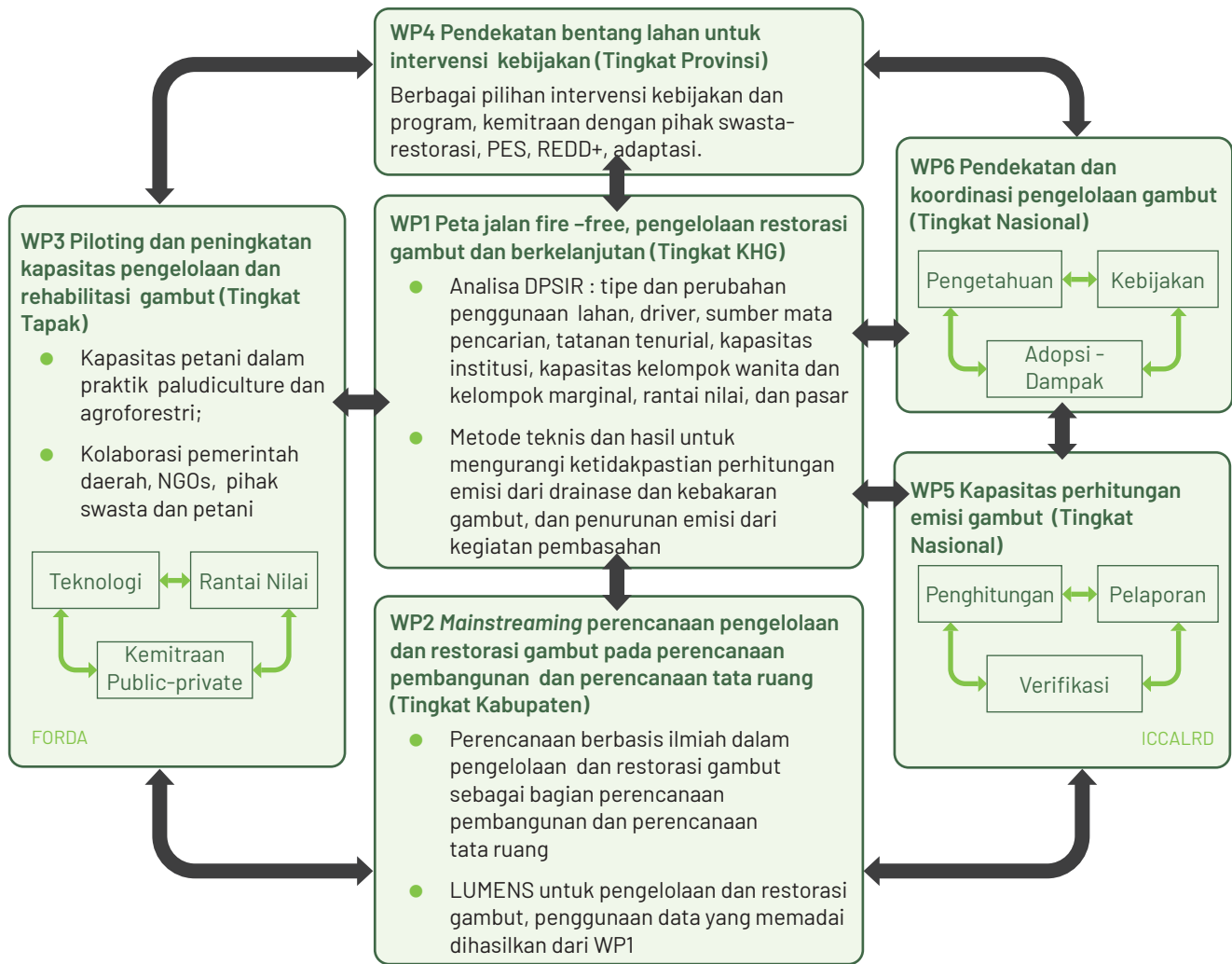


Program Peat-IMPACTS Indonesia hadir melalui gerakan #PahlawanGambut sebagai upaya konkret untuk mengatasi permasalahan kompleks ini. Dengan menggabungkan pendekatan teknis dan kelembagaan, proyek ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi lintas sektor, Peat-IMPACTS Indonesia berupaya mewujudkan transformasi lanskap gambut, dari sumber emisi menjadi benteng pertahanan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada lahan gambut. Kegiatan ini dilaksanakan lewat pendanaan dari BMU IKI dengan durasi kegiatan selama 5 tahun dari tahun 2020-2024.

Tujuan

Peat-IMPACTS Indonesia hadir dengan tujuan utama untuk mendukung tercapainya pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan cerdas iklim di Indonesia. Melalui pendekatan lanskap transformatif yang memadukan peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan, proyek ini berupaya menyelaraskan upaya restorasi dan pengelolaan lahan gambut dengan kebutuhan sektor publik dan swasta. Secara lebih spesifik, **Peat-IMPACTS memiliki enam tujuan:**

- 1 Meningkatkan pemahaman tentang risiko kebakaran gambut dan emisi di dalam bentang lahan. Peat-IMPACTS Indonesia berupaya membangun kesadaran akan bahaya kebakaran lahan gambut dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat.
- 2 Memperkuat kapasitas untuk mengintegrasikan pengelolaan lahan gambut ke dalam tata kelola bentang lahan yang lebih luas. Ini mencakup upaya untuk menyelaraskan pengelolaan lahan gambut dengan berbagai fungsi lanskap, seperti produksi dan perlindungan, untuk berkontribusi pada komitmen nasional Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
- 3 Mengembangkan model pengelolaan lahan gambut berkelanjutan yang dapat direplikasi dan ditingkatkan. Peat-IMPACTS Indonesia bertujuan untuk menciptakan model pengelolaan lahan gambut yang efektif dan dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.
- 4 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Ini mencakup pelatihan, lokakarya, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta.
- 5 Memfasilitasi kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan lahan gambut. Peat-IMPACTS berupaya membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.
- 6 Membangun sistem pengelolaan pengetahuan yang mampu menjembatani kerja sama lebih erat antar pemangku kepentingan di ekosistem gambut.



Kerangka kerja utama Peat-IMPACTS

Strategi

Peat-IMPACTS Indonesia menerapkan strategi implementasi yang komprehensif dan terpadu untuk mencapai tujuannya. Strategi ini mencakup beberapa pendekatan utama:



- **Pendekatan Lanskap.** Pendekatan lanskap yang mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai fungsi lahan gambut, seperti produksi, perlindungan, dan konservasi. Upaya pengelolaan lahan gambut diintegrasikan ke dalam tata kelola bentang lahan yang lebih luas meliputi Kesatuan Hidrologis gambut (KHG) dan unit yurisdiksi untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara berbagai kepentingan.



- **Penguatan Kapasitas.** Memberikan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.



- **Pengembangan Model Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan.** Mengembangkan model pengelolaan lahan gambut yang efektif, efisien, dan dapat di replikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Model ini mempertimbangkan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan lahan gambut.



- **Kolaborasi Lintas Sektor.** #PahlawanGambut memfasilitasi kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lahan gambut.

Membangun Fondasi

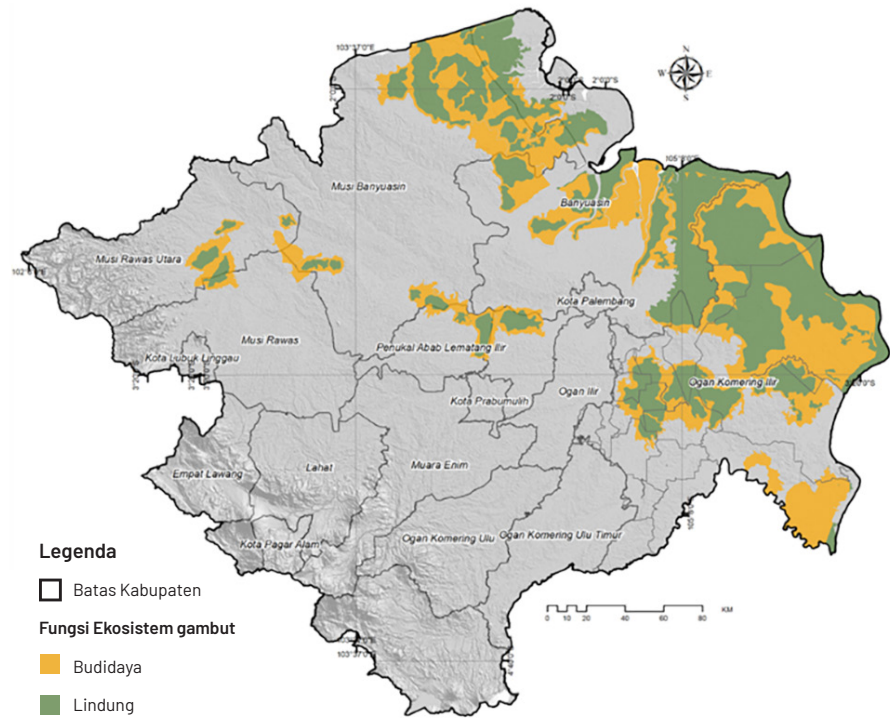
Ekosistem gambut di Sumatera Selatan memiliki luasan terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Lahan gambut Sumatera Selatan mencapai 2,09 juta hektar dengan 36 KHG yang berlokasi di 7 kabupaten, atau sekitar 24,07% dari total wilayah provinsi. Ekosistem gambut paling luas berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luasan 1,03 juta hektare atau 49,28% dari total ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua adalah Kabupaten Banyuasin dengan 0,563 juta hektare atau 26,92% dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan 0,359 juta hektare atau 17,16%. Pada kedua kabupaten ini, kebakaran lahan gambut pada tahun 2015 berkontribusi pada degradasi lahan gambut dan memberikan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Kebakaran lahan gambut yang cukup besar terulang kembali pada tahun 2019. Kebakaran gambut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Biaya kesehatan meningkat dua kali lipat karena biaya transportasi yang lebih mahal akibat jalur yang terdampak kebakaran.

Peat-IMPACTS perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah gambut. Namun, pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar di awal program. Keterbatasan mobilitas

membuat pengumpulan informasi awal tentang lokasi, masyarakat, ekosistem gambut, dan akses penghidupan menjadi sulit.

Untuk mengatasi masalah ini, Peat-IMPACTS menjalankan program Inkubasi Peneliti Muda Gambut (IPMG). Program ini melibatkan 60 peneliti muda (30 perempuan dan 30 laki-laki) yang bertugas mengumpulkan informasi awal tentang kondisi ekosistem gambut di 39 desa terpilih di Sumatera Selatan.

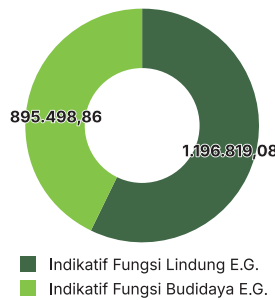
Meskipun ada keterbatasan mobilitas selama pandemi, program IPMG berhasil mengumpulkan data penting tentang kondisi ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Data ini menjadi landasan yang berharga untuk inisiasi program Peat-IMPACTS Indonesia di provinsi tersebut. Program ini juga memperkenalkan



2,09 Juta hektare
Kesatuan Hidrologis Gambut

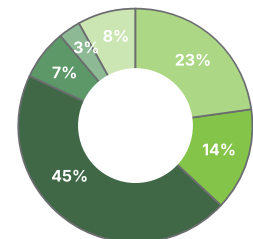
34 KHG

Proporsional Luas FEG



(Skala 1:250.000 dan 1:50.000; Saat ini peta indikatif FEG masih dalam pendetailan menjadi Skala 1:50.000)

Ketebalan Gambut



■ Dangkal (50-< 100 cm)
■ Sedang (100-< 200 cm)
■ Dalam (200-< 300 cm)
■ Sangat Dalam (300-< 500 cm)
■ Sangat Dalam Sekali (500-< 700 cm)
■ Ekstrem Sangat Dalam (>700 an)

	Luas KHG (ha)	(%)
Musi Rawas	16.851	0,8
Muara Enim	31.991	1,53
Penukal Abab Lematang Ilir	32.997	1,57
Musi Rawas Utara	55.099	2,63
Musi Banyuasin	353.370	16,82
Banyuasin	574.707	27,43
Ogan Komering Ilir	1.031.196	49,22
Luas (ha)	2.095.211	100

Sumber: SK MenLHK No. 1&2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

pendekatan berbasis penelitian kepada peneliti muda, yang diharapkan dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh IPMG. Pemilihan 6 desa intervensi program Peat-IMPACTS dilakukan secara inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga desa. Proses ini mencakup diskusi terpumpun dan wawancara terstruktur untuk mendapatkan masukan dan arahan. Setelah pemilihan desa, dilakukan penandatanganan Padiatapa antara desa dan ICRAF Indonesia sebagai pelaksana program. Padiatapa ini mengikat komitmen kedua pihak untuk menjalankan program selama 5 tahun.

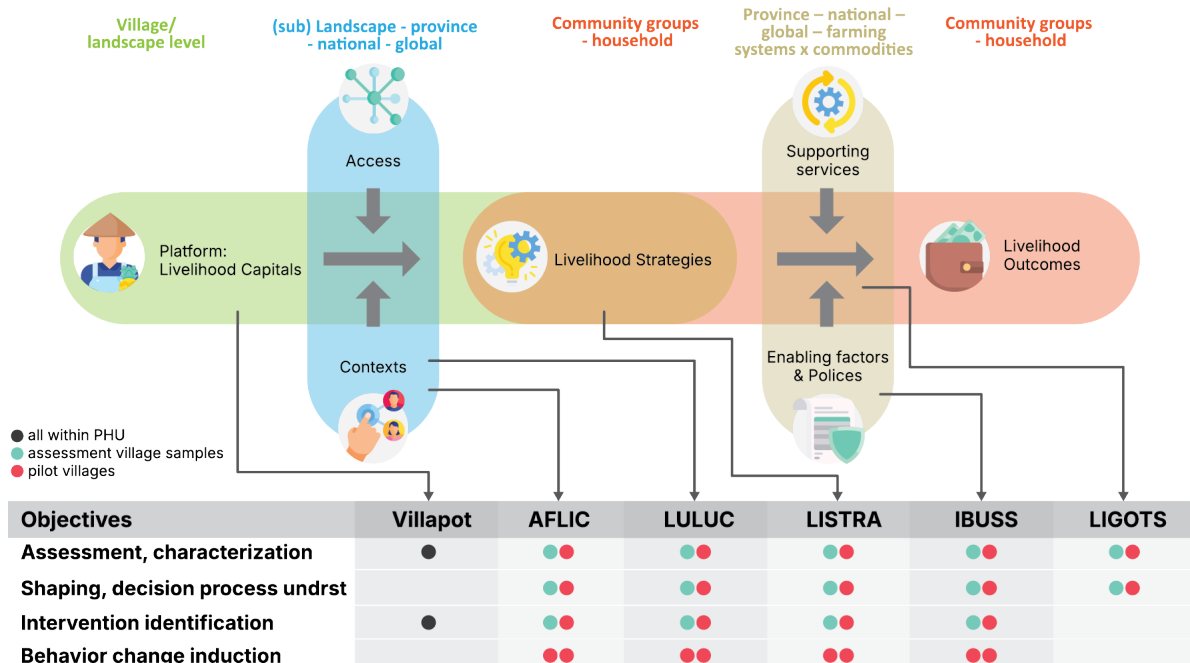
Diskusi terpumpun dan temu wicara lebih lanjut diadakan dengan berbagai pihak di tingkat desa untuk memperkuat komitmen bersama. Proses penandatanganan juga dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten, yaitu Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Kabupaten OKI dan Kabupaten Banyuwasin.



Implementasi dan Kolaborasi

Membangun opsi penghidupan berkelanjutan di ekosistem gambut

Paket Kerja Pertama dalam program Peat-IMPACTS berfokus pada identifikasi risiko dan peluang terkait mata pencaharian, konservasi, dan pencegahan kebakaran di lahan gambut. Tujuannya adalah mengembangkan peta jalan pengelolaan gambut berkelanjutan berbasis unit hidrologi gambut/lanskap. Proses ini dimulai dengan analisis data awal dari Peneliti Muda Gambut (PMG) yang mencakup 39 desa di 2 KHG. Data tersebut kemudian diolah menggunakan alat bantu *Assessment of Livelihoods and Landscapes to Increase Resilience (ALLIR)* untuk menghasilkan Peta Jalan Gambut Lestari (PEGARI) di kedua KHG.



Kerangka Kerja ALLIR



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Penyusunan PEGARI dilakukan secara inklusif dan partisipatif, dengan basis bukti ilmiah. Analisis data dasar dari laporan PMG dan studi literatur BRG/BRGM menjadi landasan dalam proses ini. Data yang dianalisis mencakup hasil wawancara, data kependudukan, analisis biofisik gambut, sampel lapangan, serta data tutupan lahan.

Konsultasi hasil awal dokumen PEGARI dilakukan melalui diskusi terpumpun di tingkat kabupaten dan provinsi. Diskusi di tingkat kabupaten berfokus pada pemutakhiran data biofisik gambut di 39 desa, sementara di tingkat provinsi, mitra TRGD dilibatkan untuk membahas data tutupan ekosistem gambut. Kajian dan analisis lanjutan juga dilakukan untuk menyesuaikan dokumen PEGARI dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait luasan ekosistem gambut. Tahap akhir dari proses ini adalah Lokakarya gabungan untuk menyampaikan dokumen PEGARI di tingkat Kabupaten dan Provinsi, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dari tingkat desa hingga kabupaten.

Penyusunan PEGARI dilakukan secara inklusif dan partisipatif, berbasis bukti ilmiah. Proses penyusunannya melibatkan analisis data dasar dari laporan PMG dan studi literatur BRG/BRGM. Data yang dianalisis meliputi hasil wawancara, data kependudukan desa, kecamatan, dan kabupaten, serta analisis biofisik keberadaan gambut dan sampel lapangan, serta data tutupan lahan seperti kebun, rawa, sungai, dan kepemilikan lahan.

Merencanakan pengelolaan gambut berkelanjutan

Paket Kerja Dua 2 memiliki tujuan utama untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan dan restorasi gambut ke dalam rencana pembangunan daerah, dengan fokus pada pertumbuhan hijau dan pembangunan rendah karbon di sektor berbasis lahan. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi pada NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia, target penurunan emisi gas

rumah kaca yang telah ditetapkan secara nasional.

Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Melalui diskusi dan kesepakatan, dibentuklah kelompok kerja yang akan mengawal proses pengelolaan gambut di Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Provinsi Sumatera Selatan secara umum.

Penyusunan RPPEG dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 60 Tahun 2019. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta pengembangan analisis dampak ex-ante. Pemerintah, sektor swasta, asosiasi, dan perguruan tinggi turut dilibatkan dalam proses ini. RPPEG Kabupaten OKI dan Banyuasin difokuskan untuk mendukung tata kelola gambut berkelanjutan melalui perencanaan pengelolaan dan restorasi gambut, serta pengarusutamaan ke dalam rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan isu strategis dilakukan diskusi untuk mengembangkan strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta penetapan indikator dan target capaian dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJMD dan rencana strategis OPD terkait. Hasil analisis dikonsultasikan melalui konsultasi publik di Kabupaten OKI, sementara proses di Kabupaten Banyuasin masih berlangsung dengan dukungan berbagai mitra pembangunan.

Perencanaan RTRW Kabupaten OKI meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan, yang dilakukan dengan keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan. Pengarusutamaan RPPEG bertujuan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut melalui tata kelola ekosistem gambut



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia



yang dilakukan secara sistematis, harmonis, dan sinergis dengan RTRW. Aspek pengelolaan dan data gambut menjadi area penentuan pola ruang RTRW Kabupaten OKI, yang harus mematuhi fungsi serta ketentuan peraturan.

Membangun contoh pertanian ramah gambut

Paket Kerja Tiga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam paludikultur dan agroforestri guna memperbaiki mata pencaharian, serta mengembangkan dan menerapkan praktik baik dalam pengelolaan lahan gambut melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan petani di tingkat lokasi. Enam desa pilot terpilih dengan memiliki potensi berbeda, sehingga model usaha tani di implementasikan sesuai dengan sumber daya dan data yang dikumpulkan, untuk selanjutnya didiskusikan bersama pemerintah daerah, desa, dan petani di masing-masing desa.

Tim kerja bersama di tingkat kabupaten, terdiri dari pemerintah kabupaten, desa, dan pihak terkait, dibentuk untuk mendukung pelaksanaan model usahatani, dengan pendekatan Outcome Mapping untuk menentukan visi, misi, dan dukungan. Tim ini ditetapkan melalui SK Bupati No.285/KPTS/BAPPEDA-LITBANG/2022 di Banyuasin

dan SK Bupati No.168/KEP/BAPPEDA-PSDA/2023 di Ogan Komering Ilir. Kemudian Tim kerja di tingkat tapak dibentuk secara partisipatif dengan perangkat desa dan petani, berperan sebagai implementor, yang disepakati dan ditandatangani oleh kepala desa, serta diketahui oleh DPMD kabupaten. Kedua tim melahirkan Kesepakatan Penghidupan Berwawasan Lingkungan (KP2BL), yang merupakan dokumen yang mengukuhkan dukungan dari berbagai pihak terhadap model usahatani di desa pilot.

Model Usahatani Agrosilvofishery & Budidaya Lebah Kelulut

Peat-IMPACTS berhasil mengembangkan model usahatani Agrosilvofishery (minapadi) dan lebah kelulut di Desa Baru, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Minapadi menggabungkan pohon, pertanian, dan perikanan dalam satu lahan, sedangkan budidaya lebah kelulut menjadi alternatif pendapatan dan mengurangi perambahan koloni lebah di Suaka Margasatwa. Petani mendapatkan pelatihan dan pendampingan mulai dari pembangunan demoplot hingga pemasaran, yang melibatkan BRIN dan UNSRI. Program ini juga berhasil meningkatkan kapasitas petani dalam PLTB, menghasilkan produk sampingan yang bermanfaat, dan menurunkan kasus kebakaran di Sumatera Selatan.



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Selain itu, program ini juga memperkuat kelembagaan BUMDesa dengan membantu pengajuan sertifikasi badan hukum hingga memperoleh sertifikat dari Kemenkumham. Fasilitas juga diberikan kepada Kelompok Tani Hutan Bunga Desa Baru dalam pengembangan usahatani lebah kelulut untuk meningkatkan jumlah adopter. Program ini juga membantu dalam pengemasan, pembuatan logo, serta pengajuan sertifikasi Halal dan izin PIRT yang masih dalam proses.

Model Usahatani Penganekaragaman Tanaman Kebun Karet Rakyat

Peat-IMPACTS juga membangun demoplot pembibitan karet dan buah-buahan seluas 0,5 hektare untuk menyediakan bibit berkualitas dan mendukung penganekaragaman tanaman di kebun karet rakyat di Desa Lebung Itam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten OKI. Tiga klon bibit karet unggulan (GT 1, IRR112, dan BPM 24) dipilih bersama Pusat Penelitian Tanaman Karet Sembawa. Pemilihan tanaman buah (alpukat, durian, petai, duku, dan pinang) didasarkan pada kesesuaian lahan, iklim, ketersediaan pasar, serta minat dan kemampuan petani. Pelatihan dan pendampingan diberikan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola dan membudidayakan karet dan tanaman buah.

Selain itu, program ini juga fokus pada penguatan kelembagaan dan pemasaran. Lembaga Desa seperti BUMDesa, Koperasi, dan PKK berperan penting sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Keterhubungan dengan petani ditingkatkan dalam penyediaan alsintan, permodalan, pengelolaan produk turunan, pemasaran, dan optimalisasi potensi Desa. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk mendukung peran lembaga Desa tersebut bagi setiap anggotanya.

Model usahatani pengayaan jenis tanaman kebun sawit monokultur

Peat-IMPACTS mengembangkan sistem usaha tani yang berkelanjutan melalui pembangunan demoplot agroforestri kelapa sawit dengan tanaman sisipan pinang dan alpukat, serta demoplot peremajaan kelapa sawit tua dengan pendekatan sisipan di Desa Nusakarta, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI. Petani mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam Good Agriculture Practice (GAP), pupuk organik, penerapan agroforestri, serta teknik budidaya dan paska panen empon-empon.

Di bidang kelembagaan dan pemasaran, Kelompok perempuan/PKK Desa Nusakarta aktif mengelola dan membudidayakan empon-empon (jahe dan kunyit) yang telah dipamerkan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Program ini juga berupaya meningkatkan kapasitas dan pendampingan dalam budidaya, paska panen, dan pemasaran, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan peluang pasar yang lebih luas.

Selain itu Peat-IMPACTS juga mengembangkan pembuatan pupuk organik berbahan baku tandan kosong kelapa sawit (TKKS), yang merupakan limbah dari industri kelapa sawit di Desa Rengas Abang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI. Uji coba pupuk organik telah dilakukan dan menunjukkan hasil laboratorium yang baik terkait kandungan unsur hara. Selanjutnya, analisis profitabilitas kelayakan usaha pupuk organik dilakukan untuk mengkaji potensi pengembangannya secara komersial, dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah desa dan pihak terkait.

Dari sisi kelembagaan dan pemasaran, pembuatan pupuk organik ini didasarkan pada analisis potensi desa, dengan dukungan dari perusahaan sebagai penyedia bahan



Musyawahar desa "pengalihan potensi usaha desa dan dukungan dari para pihak.

© CIFOR-ICRAF Program Indonesia



Pengembangan agroforestri karet dan budidaya empon-empon untuk KWT di Desa Penangoan Duren, Tulung Selapan, Kabupaten OKI



Pelatihan GAP empon-empon dan penanganan pasca panen untuk optimalisasi pekarangan dan lahan karet guna meningkatkan kesehatan dan ekonomi rumah tangga



Pelatihan pupuk organik untuk kesinambungan hidup tanaman budidaya dan keberlanjutan pelestarian lahan gambut



Pelatihan pupuk organik untuk kesinambungan hidup tanaman budidaya dan keberlanjutan pelestarian lahan gambut



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia

baku TKKS. Koperasi Plasma berperan sebagai pasar utama untuk pupuk organik ini, didukung oleh Camat Air Sugihan sesuai Perbup OKI no 85 tentang kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Tokoh masyarakat juga memberikan dukungan terhadap program ini karena dinilai dapat menambah pemasukan desa, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Pengembangan agroforestri tanaman palatabilitas rendah serangan gajah,

Di Desa Jadi Mulya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI, Peat-IMPACTS menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi untuk mengatasi dampak negatif interaksi antara gajah dan upaya pelestarian ekosistem gambut. Program ini mencakup pembangunan pembibitan tanaman yang kurang disukai gajah, pelatihan desain agroforestri,

serta pembuatan pupuk organik padat dan cair untuk menjaga keberlanjutan lahan gambut. Selain itu, pelatihan perbanyak tanaman secara vegetatif dan generatif juga diberikan, termasuk metode "petani ke petani" untuk menyebarkan pengetahuan ke desa-desa lainnya.

Dari sisi kelembagaan, program ini menekankan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah, termasuk BKSDA Sumsel. Kolaborasi ini terwujud dalam pembentukan Pokja Sugihan Simpang Heran yang melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, desa juga bermitra dengan BPDAS Musi untuk menyalurkan bibit buah produktif yang dapat ditanam di pekarangan, dengan tujuan meningkatkan gizi dan ekonomi keluarga.



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Merancang Pembiayaan Inovatif Untuk Pengelolaan Ekosistem Gambut

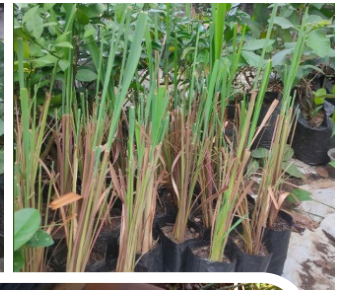
Paket Kerja 4 mengkaji dan memanfaatkan berbagai peluang intervensi kebijakan dalam restorasi, pembayaran untuk Jasa Lingkungan (PES), REDD+, dan strategi adaptasi, serta kemitraan publik-swasta. Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan rangkaian diskusi ditingkat Provinsi dan Tingkat kabupaten, untuk identifikasi model-model alternatif pembiayaan guna mendukung pelaksanaan perlindungan ekosistem gambut berkelanjutan. Alternatif pembiayaan yang teridentifikasi:

- 1 Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE).
- 2 *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
- 3 Dana Hibah melalui pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).
- 4 Kemitraan dengan pihak Swasta.

Kelanjutan diskusi terfokus di tingkat provinsi dan kabupaten, menghasilkan masukan dan opsi intervensi, dan selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan untuk menghitung potensi konflik satwa, dengan pelibatan kabupaten dan perangkat desa.



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia



© CIFOR-ICRAF Program Indonesia



Pada kegiatan ini telah dilakukan studi literasi mengenai palatabilitas rendah serangan gajah dan permodelan pasar untuk sumber mata pencarian alternatif di Desa Jadi Mulya. Komoditas dengan potensi ekonomi besar yang teridentifikasi meliputi petai, jengkol, serih, empon-empon, dan cabai. Tanaman ini tidak hanya dapat meningkatkan penghidupan masyarakat, namun berfungsi sebagai penangkal masuknya gajah ke sawah.

Selain menghitung rantai nilai palatabilitas rendah serangan gajah, juga dilakukan kunjungan ke Balai Konservasi Gajah di Air Sugihan untuk mempelajari perilaku gajah dan jenis-jenis tanaman pakan mereka.

Diskusi dan penjajakan kemitraan dengan PT. Kerawang Ekawana Nugraha (PT. KEN)

Pertemuan dengan PT. KEN di Desa Jadi Mulya membahas kemitraan untuk lokasi konservasi gajah guna mencegah konflik antara gajah dan masyarakat di tiga desa di Simpang Heran. Model yang diajukan PT. KEN mirip dengan yang ditawarkan oleh Paket Kerja 4, dan kolaborasi antara PT. KEN dan ICRAF diharapkan dapat mengurangi konflik gajah. Namun, proses ini memerlukan keterlibatan tim di tingkat provinsi dan kabupaten, serta pemahaman masyarakat desa tentang peran dan partisipasi mereka dalam skenario kemitraan yang diusulkan.



Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten OKI, yang baru disahkan melalui SK Bupati OKI Nomor 454 tahun 2023, memulai langkah dengan menyusun rancangan SK Bupati. Rancangan ini mengatur penetapan alokasi dan kriteria pemberian penghargaan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berbasis kinerja. Lampiran rancangan SK Bupati telah dilengkapi dengan indikator penilaian dan mekanisme perhitungan kinerja perusahaan dalam melaksanakan TJSL, dengan fokus pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Rancangan ini juga memperkuat regulasi terkait TJSL yang ada, termasuk Peraturan Bupati OKI Nomor 23 tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan.

Proses penyusunan rancangan SK Bupati TJSL OKI melalui rangkaian lokakarya dan diskusi terpumpun dengan berbagai pemangku kepentingan, guna mengumpulkan ide-ide inovatif dan perspektif beragam. Saat ini, rancangan SK tersebut telah dikonsultasikan dan dalam tahap pemrosesan untuk disahkan. Dengan diterbitkannya SK Bupati TJSL OKI, Kabupaten OKI memiliki instrumen kuat untuk mendorong perusahaan berinvestasi dan berkontribusi pada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta menyelesaikan isu ekologi, termasuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Diharapkan, regulasi ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, serta mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah jangka panjang.



Memperkuat data dan informasi untuk pengukuran emisi gambut

Proyek Peat-IMPACTS berkontribusi dalam membangun kapasitas nasional dalam penghitungan emisi dari lahan gambut. Paket Kerja Lima yang diselenggarakan oleh BPSI Tanah dan Pupuk-Kementerian Pertanian serta Peneliti Badan Riset dan Inovasi nasional (BRIN) adalah mengevaluasi emisi CO₂ dari beberapa tipe tutupan lahan di dua provinsi, dengan tujuan menghasilkan faktor emisi baru. Ketika data pengelolaan lahan gambut dan emisi dipublikasikan, akan ada potensi menyempurnakan faktor emisi lahan gambut tropis di bawah berbagai jenis penggunaan lahan.

Faktor emisi spesifik negara dan daerah sangat penting untuk merevisi *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia di sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) dan dalam merumuskan strategi untuk mencapai target pengurangan emisi. Hasil penelitian yang dihasilkan ini diharapkan berkontribusi pada *Emission Factor Data Base* (EFDB) dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Hasil penelitian ini akan menjadi penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang memiliki lahan gambut tropis.

Kontribusi lain yang diberikan oleh Peat-IMPACTS adalah pengembangan pedoman inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berbagai proses penyusunan informasi praktis mengenai gambut dan pengelolaan gambut berkelanjutan telah dihasilkan. Diseminasi publikasi ilmiah, keikutsertaan dalam seminar nasional dan internasional juga telah dilaksanakan. Dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelatihan inventarisasi GRK dan pengelolaan gambut berkelanjutan telah diselenggarakan, berbagai diskusi kelompok terpumpun mengenai cara pengelolaan lahan gambut yang lebih baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Peat-IMPACTS juga mengembangkan panduan tentang metode inventarisasi emisi gas rumah kaca dari proses dekomposisi dan kebakaran gambut, guna mendukung pencapaian *Forest and other Land Uses Net Sink 2030* (FOLU Net Sink 2030). Di sektor pertanian, pemahaman tentang proses dan prinsip penghitungan emisi gas rumah kaca sangat penting untuk menentukan strategi





penurunan emisi, serta meningkatkan produktivitas tanaman, karena emisi gas rumah kaca yang rendah adalah kunci dari keberlanjutan pengelolaan lahan gambut. Panduan ini diharapkan menjadi acuan untuk inventarisasi emisi gas rumah kaca dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, serta dapat digunakan oleh akademisi dan pemerhati gambut.

Membangun pengelolaan pengetahuan untuk ekosistem gambut

Paket Kerja Enam berkolaborasi dengan Forum DAS Musi meluncurkan inisiatif Muatan Lokal (MULOK) Ekosistem Gambut dan DAS untuk sekolah dasar di OKI dan Banyuasin. Inisiatif ini disambut baik oleh Dinas Pendidikan setempat, yang kemudian membentuk tim penyusun untuk mengembangkan materi ajar.

Tim penyusun, bersama ICRAF dan Forum DAS, memulai dengan menyusun rencana kerja secara partisipatif. Lokakarya kick-off tingkat provinsi dihadiri oleh kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan berbagai narasumber. Selanjutnya, diskusi terpumpun dilakukan untuk menyusun bahan ajar untuk kelas 4, 5, dan 6 SD, yang berlangsung selama lebih dari empat bulan.

Uji coba bahan ajar MULOK di sekolah-sekolah menunjukkan antusiasme siswa dalam memahami ekosistem gambut dan DAS. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan berhasil mendapatkan payung hukum untuk MULOK ini di kedua kabupaten. Melalui perlombaan tingkat provinsi, terpilih logo dan nama "SIGALE" (Sistem Informasi Gambut Lestari) untuk memperkuat identitas MULOK Gambut dan DAS.

Peat-IMPACTS juga meluncurkan platform literasi inovatif bernama WikiGambut di Sumatera Selatan, sebagai hasil pertemuan komunitas yang menyadari pentingnya literasi tentang ekosistem gambut. WIKIGAMBUT berfungsi mengumpulkan dan mensintesis pengetahuan tentang ekosistem gambut dalam sebuah sistem pengelolaan pengetahuan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan terkait lahan gambut.

WikiGambut dikelola oleh komunitas yang peduli terhadap isu-isu gambut. Komunitas ini menyediakan platform bagi kontributor dari berbagai latar belakang untuk berbagi penelitian, pengamatan, dan pengetahuan tentang gambut dengan cara yang mudah dipahami. Selain itu, WikiGambut juga menjadi sumber informasi bagi mereka yang ingin belajar tentang gambut.

Setelah pembentukannya, komunitas WikiGambut Sumsel membentuk tim kepengurusan WikiWentara untuk memilih pengurus baru. Dengan kolaborasi dan masukan dari berbagai pihak, kepengurusan baru berhasil terpilih. Bersama Program Peat-IMPACTS, Badan Kepengurusan WIKIGAMBUT Sumsel kemudian menyusun rangkaian kegiatan seperti Bincang Gambut, Beda Artikel, Gambut to Campus, dan sosialisasi MULOK Gambut dan DAS di Sumatera Selatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang gambut.



Evaluasi dan Keberlanjutan

Program Peat-IMPACTS Indonesia yang sudah berlangsung hampir 5 tahun di Provinsi Sumatera Selatan, di Kabupaten OKI dan Kabupaten Banyuasin.

- 1 Dokumen Peta Jalan Gambut Lestari (PEGARI) telah disusun melalui pendekatan inklusif dan partisipatif, mencakup 39 dokumen untuk 39 desa yang berada di dua Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG): Sungai Saleh – Sungai Sugihan dan Sungai Sugihan – Sungai Lumpur. PEGARI berpotensi menjadi referensi penting dalam perencanaan di tingkat desa, khususnya dalam upaya perlindungan ekosistem gambut yang ada.
- 2 Alat Bantu permodelan ALLIR dalam penyusunan dokumen PEGARI akan sangat bermanfaat jika bisa diajarkan dan digunakan oleh perangkat pemerintahan, baik yang ada di provinsi sampai dengan perangkat di tingkat kabupaten.
- 3 Dokumen perencanaan daerah tingkat provinsi yang sudah mengedepankan perlindungan ekosistem gambut agar bisa diturunkan ke dalam dokumen perencanaan yang ada di tingkat kabupaten. Hal ini dapat memastikan keberlanjutan dan kesinambungan kebijakan perlindungan ekosistem gambut di berbagai tingkatan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
- 4 Dalam rangka mewujudkan ekosistem gambut yang lestari, dibutuhkan intervensi yang konsisten didukung dengan sumber pendanaan yang nilainya tidak sedikit. Skema pendanaan inovatif yang berhasil diidentifikasi selama ini, diharapkan dapat terus mendorong keberlanjutan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, baik di level provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat tapak. Dalam hal ini, Bappeda memiliki peranan yang penting untuk memastikan segala prosesnya terintegrasi dengan baik dalam proses perencanaan daerah.
- 5 Pada tahapan berikutnya, kurikulum muatan lokal DAS dan gambut yang telah diterapkan pada level sekolah dasar di Kabupaten OKI dan Kabupaten Banyuasin, diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan diadopsi oleh kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Selatan yang memiliki ekosistem gambut. Sementara itu, Wikigambut juga diharapkan dapat konsisten menjadi platform berbagi pengetahuan tentang gambut serta semakin berkembang dan inovatif dari segi komunitas maupun media berbagi.

Penutup

Rekam jejak ini merangkum perjalanan program Peat-IMPACTS Indonesia di Sumatera Selatan selama 5 tahun, khususnya di KHG Sungai Saleh-Sungai Sugihan dan KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur yang mencakup Kabupaten OKI dan Banyuasin. Meski program ini telah berakhir, warisan, pembelajaran, dan ilmu yang ditinggalkannya diharapkan menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Sumatera Selatan dalam mengelola ekosistem gambut secara lestari. Kami berharap, di masa datang, masyarakat di ekosistem gambut Sumatera Selatan dapat mencapai kesejahteraan melalui praktik-praktik pengelolaan gambut yang baik. Terima kasih kami haturkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Forum DAS Sumatera Selatan, Pemerintah Desa, dan seluruh pihak yang telah mendukung kiprah #PahlawanGambut di Sumatera Selatan.

Sitasi

Susanto D, Yuliadi A, Maulana A, Benita T, Rahayu S, Pandiwijaya A, Leimona B, Mufida A, Atikah T, Johana F, Ekadinata A. 2024. *Rekam Jejak #PahlawanGambut-Sumatera Selatan: Ringkasan Upaya Peningkatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan melalui Peat-IMPACTS Indonesia*. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF Program Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia | Tel: +(62) 251 8625 415
Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org | www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia



Supported by:



based on a decision of
the German Bundestag